

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Ibu sebagai kepala desa, perencanaan keuangan di Desa ini sejauh ini apakah sudah dapat dikatakan baik jika ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Alhamdulillah sudah
2.	Apakah Ibu bisa menunjukkan buktinya ?	Kalau buktinya suatu misal adalah kunjungan dari inspektorat atau evaluasi inspektorat Kabupaten Nganjuk Alhamdulillah sudah berjalan lancar dan kebetulan memang baru dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Dari inspektorat sendiri sudah menyatakan bahwa Alhamdulillah di Desa Loceret tidak ada penemuan. Ada beberapa yang perlu di evaluasi itu istilahnya bukan kesalahan yang fatal. Jadi memang, terkadang ada beberapa dari kami perangkat Desa itu yang memang tidak mengetahui atau belum memahami administrasi yang seharusnya. Cuman itu hanya sedikit ketidakfahaman dari kami.

3.	APBDesa untuk tahun 2019 pernah mengalami perubahan ?	Pasti ada. Tiap tahun pun ada.
4.	Apa sebabnya?	Biasanya perhitungannya itu perubahan itu kan biasanya semakin meningkat. Biasanya dengan penambahan penduduk dilihat dari populasi Desa. Atau mungkin biasanya dari keputusan desa itu sendiri. Biasanya bisa merubah nominal dari dana desa.
5.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang?	Alhamdulillah sangat antusias setiap kami undang dari berbagai unsur kalau masyarakat satu desa tidak mungkin kita undang jadi perwakilan seperti RT RW, Kader, kelompok tani terus dari lembaga lembaga yang lain seperti PKK, BPD, karang taruna alhamdulillah sangat antusias untuk menghadiri musren dan juga musdes
6.	Dari 100% itu berapa persen yang datang	Untuk yang hadir hampir 90%
7.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan Dana Desa	Untuk perencanaan selalu kami melibatkan masyarakat dimana yang sudah diwakili oleh RT RW masing masing, itupun kami selalu menampung aspirasi dari masyarakat apa yang mereka butuhkan. Walaupun pada akhirnya juga kami harus meranking mana yang lebih urgent dan mana yang lebih didahulukan dalam proses pembangunan.
	Apakah terdapat komitmen	Kalau komitmen pastinya kami ingin

8.	dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?	membangun Desa Loceret yang lebih baik pastinya seperti itu dan meningkatkan SDM yang unggul pastinya. Karena bagi kami komitmen kami adalah akan percuma apabila infrastruktur yang ada Desa Loceret itu akan berkembang pesat tetapi SDM itu tetap diam di tempat. Nah ini komitmen kami untuk menyeimbangkan antara infrastruktur dan juga SDM dari masyarakat itu sendiri.
9.	Bagaimana cara pemerintah desa melakukan mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa?	Yang pasti mekanisme itu ya seperti Musren MusDes ya itu kan yang saya sampaikan dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat dan beberapa lembaga yang ada di Desa Loceret
10.	Bagaimana Ibu menanggapi masukan dari peserta musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?	Semua kita tampung selama itu usulan mereka baik pemberdayaan, baik itu infrastruktur, bidang pertanian, bidang pemberdayaan selama tidak menyimpang dari hukum atau aturan yang sudah ada, selalu kita tampung.
11.	Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	Alhamdulillah lancar sampai hari ini dan pastinya semua persyaratan atau proses-proses bagaimana kita mencairkan anggaran itu kita lakukan atau kita lewati tahapan-tahapannya seperti itu harus menyelesaikan LPJ terlebih dahulu, menyelesaikan APBD baru kita bisa mencairkan anggaran. Itu

		selalu kita lalui dengan melampirkan bukti kalau belanja supaya untuk menyusun laporan pertanggungjawaban lebih mudah.
12.	Bagaimana peran Ibu sendiri dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas terkait program desa?	Alhamdulillah setiap apapun, baik mulai perencanaan sampai nanti pertanggungjawaban saya selalu ada disitu. Karena memang tidak mungkin lepas dari saya karena saya bertanggung jawab. Jadi mulai dari perencanaan, ya seperti MusDes, Musren atau mungkin survey lokasi kalau untuk infrastruktur itupun saya selalu menghadiri. Supaya saya benar benar tahu ini benar benar dibutuhkan masyarakat atau tidak. Kalau kita hanya mempercayakan kepada perangkat desa yang lain, terkadang pemerintah dan perangkat desa yang lain tidak mengetahui ini benar benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak, seperti itu.
13.	Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Loceret ini bagaimana Bu ?	Alhamdulillah seimbang, sudah seimbang dengan infrastruktur di Desa kami pemberdayaan ini, apa nggeh alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa. Suatu misal disini ada pemberdayaan dibidang perempuan karena stunting yang ada di Desa Loceret juga tinggi dan juga stunting menjadi program unggulan dari Pemerintah Pusat dan menjadi perhatian khusus. Dan

		kami 4 tahun yang lalu sudah mengadakan USG gratis untuk ibu-ibu hamil yang kurang mampu. Jadi, dibiayai oleh Dana Desa dimana USG itu kan bertujuan untuk bisa mendeteksi perkembangan janin yang ada di ibu hamil juga vaksin gratis untuk mencegah kanker serviks begitupun juga dengan sosialisasi bahaya kanker serviks, terus menjahit. Jadi kita juga sudah punya 6 alat jahit dimana satu tahun kita pinjamkan nanti kita ambil untuk dipinjam kembali peserta menjahit di tahun berikutnya. Tujuannya ya itu bisa membantu perekonomian di keluarga tanpa harus keluar rumah. Terus yang lain juga pelatihan pelatihan lain alhamdulillah disini semuanya berjalan seiring dengan infrastruktur.
14.	Apakah setiap pengeluaran selalu di verifikasi oleh sekertaris desa terlebih dahulu?	Pasti, pasti.
15.	Bagaimana teknis di lapangannya?	Teknis di lapangan kami sudah ada PK pelaksana pembangunan, PK pelaksana pemberdayaan, sudah ada pos-posnya tersendiri. Jadi ya tinggal kami meminta pertanggung jawaban atau mungkin kami menanyakan bagaimana perkembangannya

		<p>dan meminta bukti pengeluaran supaya dilakukannya pencatatan pemasukan maupun pengeluaran kas oleh Bendahara dimana itu suatu hal yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kemudian seluruh hasil pencatatan di laporkan semuanya kepada saya selaku kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kami sebagai kepala desa tidak bekerja sendiri, sudah ada PK-PK dan memang sesuai prosedur kan seperti itu. PK pelaksana pembangunan sudah ada sendiri.</p>
	<p>gaimana tingkat keaktifan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan anggaran desa?</p>	<p>Kalau masyarakat saya pikir sangat aktif cuman ada beberapa masyarakat yang penting sudah melihat ini benar-benar di realisasi bagi mereka sudah cukup. Kalau di desa kan rata rata seperti itu, bukan terus yang mengkritisi atau bagaimana ndak, alhamdulillah tidak seperti itu. Aktifnya juga dalam artian menanyakan atau mengusulkan. Kalau untuk mengkritisi alhamdulillah tidak.</p>
16.	Berarti aman ya Bu?	Aman.
17.	Apakah tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa ?	Iya, dan tidak ada kendala
18.	Terkait perpajakan bendahara desa. Sejauh ini	Sudah.

	sudah dilaksanakan semua kewajiban memungut pajak?	
19.	Apa kendalanya?	Alhamdulillah tidak ada.
20.	Di tahap penatausahaan, menurut Ibu, keuangan desa ini bagaimana?	Menurut kami sudah cukup baik nggih. Kalau sempurna, saya rasa kok belum. Tapi sudah cukup baik. Karena memang terkadang beberapa tahun program yang ada di desa mengenai dana desa dan lain lain administrasi baru kita fahami, sudah diganti. Terkadang itu kendalanya, jadi kami baru memahami sudah diganti dengan program yang lain. Tapi kalau untuk ketertiban, kedisiplinan, transparan, insyaaAllah kami sudah cukup baik
21.	Apakah bendahara wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban?	Iya
22.	Lalu laporan tersebut harus di laporkan setiap bulan secara rutin?	Alhamdulillah sudah
23.	Di tahap pelaporan, kapan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama maupun semester akhir tahun?	Iya, 2 kali dalam setahun. Tetapi untuk pelaporan sesuai dengan tahapan tahapan. Jadi memang setelah tahap satu selesai, kita kumpulkan masyarakat yang ikut Musren atau Musdes kita sampaikan bahwasanya sudah selesai. Dan walaupun pada masa

		masa itu kalau ada yang belum selesai kita akan sampaikan dalam proses dan itupun bisa dicek oleh masyarakat itu sendiri.
24.	Kalay laporan semester pertama apakah berupa realisasi APBDesa ya Bu ?	Iya
25.	Itu sampai berapa tahap ya Bu dalam proses penyampaian?	Untuk DD itu 3 tahap, kalau ADD 2 tahap
26.	Apakah Ibu bisa jelaskan di tahap DD dan ADD nya bagaimana?	Yang dimaksud tahap pertama tahap ketiga ya pencairannya. Jadi pencairan tahap pertama apa saja kegiatannya yang kita ajukan sesuai dengan anggaran itu, setelah itu kita laporkan kepada masyarakat. Setelah itu bisa dicairkan ditahap kedua.
27.	Di tahap pertanggungjawaban, apakah Ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati?	Iya, dibantu dengan Bendahara Desa
28.	Berarti laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan setiap tahun anggaran ya Bu?	Iya, tentu. Jadi dalam laporan pertanggungjabwan realisasi pelaksanaan APBDesa kami telah sampaikan kepada Bupari setiap tahun anggaran dengan lampiran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

29.	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut di tetapkan oleh Peraturan Desa. Benar seperti itu Bu?	Iya, dan sudah sesuai
30.	Laporan realisasi dan LPJ apakah sudah di sampaikan kepada Bupati ?	Iya, sudah
31.	Kemudian apakah informasi terkait penggunaan Dana Desa sudah di informasikan kepada masyarakat?	Iya, sudah pada waktu MusRenBang.
32.	Dalam bentuk apa Bu? Menggunakan media apa?	Biasanya kita pakai pemaparan banner di depan. Itupun kami juga undang dan lewat slide ini pembangunan 0%, 50%, 80%. Setiap perjalanan pasti akan kita taruh di slide jadi masyarakat bisa mengetahui
33.	Berarti untuk informasi yang di WEB itu juga termasuk ya Bu?	Siap
34.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan dalam proses pertanggungjawaban ?	Ya itu tadi, dalam bentuk baliho kemudian lewat slide dan website.
35.	Laporan yang dimaksud dalam bidang	Semuanya. Yang berkenaan dengan anggaran. Jadi anggaran sekian, masuknya

	infrastruktur, ekonomi, dan lain lain?	sekian, untuk apa belanjanya itu di kita.
36.	Apakah terdapat kendala dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Alhamdulillah tidak. Karena semuanya sudah sesuai dengan aturan bagi saya tidak. Hanya tinggal pertanggung jawaban kalau itu memang sebenar benarnya kan gampang saja.
37.	Berarti dari Ibu mulai menjabat menjadi kepala desa sampai sekarang masih aman ya Bu?	Alhamdulillah.
38.	Apakah perencanaan yang telah disusun sudah sesuai dengan pelaksanaan program penggunaan Dana Desa?	Alhamdulillah sudah, sudah.
39.	Berarti dari 1 sampai 100% perencanaan sudah terealisasikan ya Bu?	Ohh ya, yang dimaksud itu belum. Jadi memang kita menyesuaikan dengan anggaran. Itu tadi yang saya sampaikan diawal bahwasanya akan ada pe-rankingan. Semua usul kita tampung tapi kita ranking mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda untuk tahun depan, seperti itu.
40.	Ada factor penghambat dan factor pendukung saat terjadi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam	Yang pasti cuaca, terkadang kalau kita termasuk infrastruktur itu, kalau mungkin aspal, kalau misal gitu, aspal harus dalam kondisi cuacanya panas, sedangkan

	proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?	anggaran itu keluar pada masa musim penghujan. Terkadang ini walaupun harus dialokasikan di musim kemarau kan ndak bisa, terbentur dengan aturan. Hanya itu saja kendalanya. Cuman sekarangpun kita sudah punya trik berarti ini memang harus di poskan, kita harus punya perkiraan bulan. Kalau kita memang mau mengaspal, berarti tidak boleh dicairkan ditahap pertama. Berarti harus di tahap ketiga, dimana itu masa kemarau.
--	---	--

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Perihal: Permohonan pengisian kuesioner

Yth. Bapak/Ibu Responden

Dengan hormat,

Melalui kesempatan ini, saya Dini Kurniasari, mahasiswa program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”**.

Sehubungan dengan itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden serta mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Seluruh informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian skripsi dan saya akan menjaga

kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. Saya berharap Bapak/Ibu dapat mengembalikan kuesioner ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini saya sampaikan terimakasih.

Hormat Saya

(Dini Kurniasari)

NBI 1221700036

KUESIONER

1.1.2 Identitas Responden

- Nama Instansi :
- Nama Responden :
- Tanggal Pengisian :
- Jenis Kelamin :
- Jabatan :
- Usia :
- Latar Belakang Pendidikan :
- Ekonomi/Akuntansi
 - Hukum
 - Teknik
 - Administrasi
 - Lainnya
- Pendidikan Terakhir :
- SD
 - SMP
 - SMA
 - Diploma (D3)
 - Sarjana (S1)
 - Lainnya

Lama Jabatan :

- 1-5 Tahun
- 6-10 Tahun
- 11-15 Tahun
- 16-20 Tahun
- \geq 20 Tahun

1.1.3 Petunjuk Pengisian

1. Baca dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
2. Berilah tanda centang (\surd) untuk jawaban yang menurut saudara/ i tepat di kolom yang

tersedia.

Keterangan :

- STS : Sangat Tidak Setuju
 TS : Tidak Setuju
 N : Netral/Ragu-Ragu
 S : Setuju
 SS : Sangat Setuju

Daftar Pertanyaan

Kuesioner Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Akuntabilitas						

1.	Adanya laporan terkait rincian Dana Desa yang digunakan kegiatan masyarakat Desa.					
2.	Kehadiran tim pelaksana dalam rapat rencana perencanaan hingga pengelolaan Alokasi Dana Desa.					
3.	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam mengelola Alokasi Dana Desa.					
4.	Kinerja pengelolaan keuangan pada setiap unit melibatkan semua anggota Pemerintah.					
5.	Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam mengelola Alokasi Dana Desa.					
6.	Hasil kerja yang telah atau akan tercapai akan ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan Desa.					
7.	Munculnya keterlibatan tim pelaksana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.					

8.	Tercapainya tujuan dari Alokasi Dana Desa.					
9.	Terdapat laporan secara berkala terkait penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa					
10.	Proses pengelolaan Dana Desa melibatkan seluruh unsur masyarakat.					
11.	Terdapat laporan akhir tentang perkembangan dari pelaksanaan masalah yang muncul dan saran penyelesaian hasil akhir pengelolaan Alokasi Dana Desa.					
12.	Masyarakat dengan mudah akses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.					
13.	Pengelolaan Dana Desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.					
14.	Sekertaris Desa telah menyusun APBDesa berdasarkan RKPDesa dan menyampaikan Raperdes tersebut APBDesa kepada Kepala Desa.					

15.	Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati ditindaklanjuti oleh Kepala Desa agar penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa supaya segera diperbaiki.					
16.	Pemerintah Desa tidak melakukan pungutan selain yang tercantum dalam Peraturan Desa sebagai penerimaan Dana Desa .					
17.	Bendahara Desa menyimpan dan mengatur jumlah uang kas Desa serta membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.					
18.	Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati.					
19.	Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.					
Transparansi						

20.	Akses masyarakat yang cukup dalam rencana penggunaan Dana Desa.					
21.	Adanya informasi yang akurat terkait rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.					
22.	Adanya laporan berkala terkait penggunaan Alokasi Dana Desa.					
23.	Adanya penyelenggaraan musyawarah rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.					

24.	Masyarakat selalu berpartisipasi dalam musyawarah rencana pengalokasian Dana Desa					
25.	Akses yang mudah dijangkau untuk Masyarakat terkait informasi rencana penggunaan Dana Desa.					
26.	Pengelola Dana Desa terbuka kepada seluruh Masyarakat.					
27.	Pengelola Dana Desa sangat terbuka terkait seluruh hasil pelaksanaan program Desa kepada seluruh masyarakat					
28.	Adanya akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang Dana Desa					

29.	Transparansi pengelolaan Dana Desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi Masyarakat rakyat.					
30.	Informasi tentang pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi.					
31.	Transparansi yang baik dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan.					
32.	Penyedia informasi yang bertanggung jawab.					
33.	Adanya kerja sama antara anggota Pemerintah Desa dengan media massa dalam peningkatan informasi yang lebih akurat.					

34.	Masyarakat ikut andil dalam partisipasi dalam proses perencanaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.					
35.	Masyarakat ikut mengajukan ide terkait Alokasi Dana Desa.					
36.	Masyarakat ikut memberi solusi terhadap permasalahan yang timbul saat proses pelaksanaan.					

37.	Masyarakat ikut mengawasi penggunaan Dana Desa.					
38.	Masyarakat mengawasi pelaporan kegiatan Alokasi Dana Desa.					
39.	Aparat Pemerintah dan masyarakat menghadiri musyawarah Desa dalam rangka perencanaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.					
40.	Pemerintah Desa mendukung dan sangat terbuka terkait pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.					
41.	Pemerintah Desa merasa mudah dalam membuat pertanggungjawaban administrasi.					
42.	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan rencana.					
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						
43.	Adanya pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada.					
44.	Seluruh masyarakat Desa diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa.					

45.	Tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan.					
46.	Pembangunan yang lebih diutamakan adalah pembangunan sector fisik seperti Tempat ibadah,MCK, Puskesmas, dll).					
47.	Pembangunan mencakup sektor non materil seperti peningkatan SDM berupa pemberian keterampilan.					
48.	Kebijakan sudah sangat baik yang diambil oleh para pejabat Kelurahan/Desa terhadap pembangunan Desa.					
49.	Masyarakat Desa ikut mengajukan ide mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.					
50.	Masyarakat selalu dilibatkan dalam memutuskan Alokasi Dana Desa.					
51.	Masyarakat ikut memberi masukan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.					
52.	Masyarakat ikut memberi solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul.					

53.	Masyarakat ikut bekerja dalam kegiatan Alokasi Dana Desa.					
-----	---	--	--	--	--	--

Lampiran 3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa



Lampiran 4. Struktur PPID



Lampiran 5. Pemaparan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

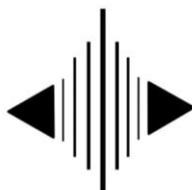
PEMAPARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDes)	
DESA LOCERET KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2020	
TOTAL PENDAPATAN DESA Rp. 1.429.145.100,00	
1. PENDAPATAN DESA	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp. 509.300.238,00
PENDAPATAN ASLI DESA Rp. 244.125.000,00	A. Sub-Bidang Pendidikan Sumber Dana : DD Rp. 36.425.50,00
2. PENDAPATAN TRANSFER	B. Sub-Bidang Kesehatan Sumber Dana : DD Rp. 101.450,00
A. Dana Desa Rp. 813.453.900,00	C. Sub-Bidang Pekerjaan Umum dan Prasarana Sumber Dana : DD Rp. 97.740,00
B. BHPRD Rp. 41.529.800,00	D. Sub-Bidang Kewacauan Perumahan Sumber Dana : DD Rp. 233.470,00
C. Alokasi Dana Desa Rp. 329.837.300,00	E. Sub-Bidang Kelautan, dan Lingkungan Hidup Sumber Dana : DD Rp. 10.000,00
TOTAL BELANJA DESA Rp. 1.402.740.038,53	
1. BIDANG PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DESA Rp. 688.888.100,00	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp. 177.164.698,53
A. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tujuan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp. 563.937.100,00 Sumber Dana : ADD, PAD, BHPRD, DD	A. Sub-Bidang Keternarikan, Kesehatan Umum dan Pertolongan Masyarakat Rp. 3422.760,00
B. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Rp. 20.861.000,00 Sumber Dana : BHPRD	B. Sub-Bidang Kemandirian dan Kegiatan Sumber Dana : DP Rp. 7619.938,53
C. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Statistik dan Kependudukan Sumber Dana : DD Rp. 47.021.000,00	C. Sub-Bidang Kemitraan dan Olahraga Sumber Dana : DD Rp. 16.600.000,00
D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 48.069.000,00 Sumber Dana : ADD, DD	D. Sub-Bidang Kemandirian Masyarakat Sumber Dana : DD Rp. 16.812.000,00
E. Sub-Bidang Pertanahan Rp. 9.000.000,00 Sumber Dana : DD	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp. 19.225.000,00
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MELAKSANAKAN DESA Rp. 8.162.02,00	
A. Sub-Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 8.162.02,00 Sumber Dana : DD	
SILPA 2019 Rp. 23.594.938,53	
PENYERTAAN MODAL BUMDes Rp. 50.000.000,00	

Lampiran 6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)**

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018



**DEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA LOCERET**

Jl. P. Tondan No. 08 Kode Pos 64471 ☎ (0358) 3512293

Lampiran 7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA
TAHUN 2013 s/d 2018**



**DESA LOCERET
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK**

DAFTAR KUNJUNGAN KERJA KE DESA LOCERET DARI 2013 S/D 2018				
NO	TGL. KUNJUNGAN	NAMA	INSTANSI	ALAMAT
1.	24-4-2013	Drs. JOKO SLAMET	Inspektorat daerah Kab Nganjuk	Nganjuk
		ROCHZEDY JUWONO. SP		
		DEWI ANAWATI, SE		
2.	25-05-2013	SARWO WIDODO	P2KAD	
		Moh Zaini		
		HARI SANTOSO		
3.	02-06-2014	EDY SUNTYO R	Inspektorat	Nganjuk
		Drs NURCAHYO		Nganjuk
		AGUNG S		
		Drs LIS AGUSTINING		
		RENY P. SE		
		DWI TRISTANTI		
4.	16-06-2014	ELOK SUSWATI	Kecamatan	Loceret
5.	20-05-2015	AKP. M. SUDARMAN, SH	POLSEK LOCERET	Loceret
		IPDA H. KUNTO BASWORO		
		AIPTU GATOT S. BRIPKA SUGENG ARIADI		
6.	06-07-2015	SARNO	Kecamatan	Loceret
		SUPRIYANTO		
7.	09-07-2015	Suntoro, SPd	Inspektorat	Nganjuk
		Sutanto, SPd		
		TITIK S, SE		
		BUDI F, SE		
		SUMARYANA SE		
		ARI W, SE		
8.	15-02-2016	SARJI	KORAMIL	Loceret
9.	28-042016	Drs SUYANTO	Inspektorat	Nganjuk
		HERU S.Sos, MM		

		Deddy, SE, MSi		
		WITRI SE.		
		INTAN. ST		
10.	07-02-2017	ALI WASIIN	ADVOKAT	Nganjuk
11.	12-04-2017	PRAYITNO	KORAMIL	Loceret
12.	19-04-2016	RUSMINAH	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nganjuk
		LIS A		
		WARTINEM		
		SLAMET R		
		SAMSUL		
		DAMARI		
13.	10-05-2017	Ir. KUSNO. H	Inspektorat	Nganjuk
		Drs. NURCAHYO		
		RENY		
14.	27-10-2017	UONNY R	Dinas PMD	Nganjuk
		SUDARNO		
		SUPRIANTO		
		NURDIAN		
15.	01-03-2018	TRI W	POLRES	Nganjuk
		IMAM W		
		AGUS		
		JAROT		
		EKO		
	24 -07- 2018	DEDY	Inspektorat	Nganjuk.
		NURCAHYO		
		TANTI		
		ANAS		
		Maryana		

BAB VI
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Belanja Desa Loceret terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dari Pusat, APBD Propinsi Dan APBD Kabupaten. Untuk dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Pemerintah telah memberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan Bagi hasil pajak dan retrebusi Daerah Kabupaten/kota yaitu :

1. Tahun 2013

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan :

1.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	174.190.000
2.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	:	Rp.	5.159.000
3.	ADD	:	Rp.	96.394.000
4.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	:	Rp.	118.540.000
Jumlah Pendapatan			:	Rp. 394.283.000

Belanja :

1.	Belanja Langsung	:	Rp.	140.423.500
2.	Belanja Tidak Langsung	:	Rp.	242.540.000
Jumlah Belanja			:	Rp. 382.963.500
Surplus			:	Rp. 4.819.500

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH Rp.)
A	BELANJA LANGSUNG	Rp. 140.423.500
	Belanja Pegawai / Honorarium	Rp. 4.100.000
	Honor tim / panitia	Rp. 3.600.000
1	Honor panitia lelang tanah kas desa	Rp. 1.000.000
2	Honor PPKBD dan Sub. PPKBD	Rp. 1.200.000
3	Honor juru kunci makam	Rp. 400.000
4	Honor bendahara desa	Rp. 500.000
5	Honor petugas PSN	Rp. 500.000
6	Honor Guru PAUD	Rp. 500.000
	Belanja Barang / Jasa	Rp. 85.036.400
1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 4.000.000
2	Perjalanan Hansip	Rp. 500.000
3	BAO Pemerintah Desa	Rp. 22.170.700
4	BAO BPD	Rp. 6.747.600
5	Kegiatan pemberdayaan TP PKK	Rp. 7.229.600
6	Kegiatan pemberdayaan LPM	Rp. 2.891.900
7	Kegiatan pemberdayaan RT/RW	Rp. 4.819.700
8	Kegiatan pemberdayaan Karang Taruna	Rp. 1.927.900
9	Peningkatan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pakaian Dinas)	Rp. 1.800.000
10	Penyelenggaraan kegiatan pilkades	Rp. 6.500.000
11	Belanja BKK Operasional RT/RW	Rp. 19.800.000
12	Belanja TK	Rp. 699.000
13	Konsumsi rapat	Rp. 1.500.000
14	Pembayaran listrik	Rp. 500.000
15	Pemeliharaan dan kebersihan kantor	Rp. 1.300.000
16	Perawatan Peralatan Kantor	Rp. 1.400.000
17	Belanja kegiatan HUT RI dan Nganjuk	Rp. 1.250.000

	Belanja Modal	Rp. 51.787.100
1	Kegiatan penyemiran jalan lingkungan	Rp. 45.787.100
2	Kegiatan pemasangan listrik makam	Rp. 6.000.000
		Rp.
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 242.540.000
	Belanja pegawai / penghasilan tetap	Rp. 242.540.000
	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	Rp. 147.500.000
1	Penghasilan tetap kepala desa	Rp. 41.300.000
2	Penghasilan tetap sekdes non PNS	Rp. 23.600.000
3	Penghasilan tetap kamituwo 1	Rp. 11.800.000
4	Penghasilan tetap kamituwo 2	Rp. 11.800.000
5	Penghasilan tetap kebayan 1	Rp. 11.800.000
6	Penghasilan tetap kebayan 2	Rp. 11.800.000
7	Penghasilan tetap modin	Rp. 11.800.000
8	Penghasilan tetap jogotirto	Rp. 11.800.000
9	Penghasilan tetap jogoboyo	Rp. 11.800.000
10	Tunjangan tambahan penghasilan / kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa	Rp. 84.780.000
11	Tunjangan BPD	Rp. 5.160.000
12	Tambahan tunjangan lainnya BPD	Rp. 1.100.000
13	Tunjangan purna tugas kepala desa	Rp. 4.000.000
		Rp.
	Belanja Hibah	Rp. 6.000.000
1	Pembangunan Madin	Rp. 6.000.000
		Rp.
	JUMLAH BELANJA	Rp. 389.463.500
		Rp.
	SURPLUS / DEFISIT	Rp. 4.819.500
		Rp.
	PEMBIAYAAN	Rp. 4.819.500
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
1	Penyertaan Modal Desa	Rp. 4.819.500
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp. (4.819.500)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 0

2. Tahun 2014

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan :

1.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	177.000.000	
2.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	:	Rp.	5.159.000	
3.	ADD	:	Rp.	108.724.000	
4.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	:	Rp.	118.540.000	
Jumlah Pendapatan			:	Rp.	198.908.000

Belanja :

1.	Belanja Langsung	:	Rp.	198.047.000	
2.	Belanja Tidak Langsung	:	Rp.	286.308.000	
Jumlah Belanja			:	Rp.	484.355.000
			:		
Surplus			:	Rp.	5.436.000

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH Rp.)
A	BELANJA LANGSUNG	Rp. 198.047.000
	Belanja Pegawai / Honorarium	Rp. 5.500.000
	Honor tim / panitia	Rp. 2.300.000
1	Honor panitia lelang tanah kas desa	Rp. 2.300.000
2	Honor PPKBD dan Sub. PPKBD	Rp. 1.200.000
3	Honor juru kunci makam	Rp. 400.000
4	Honor bendahara desa	Rp. 600.000
5	Honor petugas PSN	Rp. 500.000
6	Honor Guru PAUD	Rp. 500.000
	Belanja Barang / Jasa	Rp. 86.403.500
1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 4.000.000
2	Perjalanan Hansip	Rp. 500.000
3	B/AO Pemerintah Desa	Rp. 25.010.000

4	BAO BPD	Rp.	7.610.000
5	Kegiatan pemberdayaan TP PKK	Rp.	8.153.500
6	Kegiatan pemberdayaan LPM	Rp.	3.261.000
7	Kegiatan pemberdayaan RT/RW	Rp.	5.436.000
8	Kegiatan pemberdayaan Karang Taruna	Rp.	2.174.000
9	Peningkatan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pakaian Dinas)	Rp.	1.800.000
10	Belanja BKK Operasional RT/RW	Rp.	19.800.000
11	Belanja ATK	Rp.	709.000
12	Konsumsi rapat	Rp.	2.100.000
13	Pembayaran listrik	Rp.	600.000
14	Pemeliharaan dan kebersihan kantor	Rp.	1.500.000
15	Perawatan Peralatan Kantor	Rp.	2.500.000
16	Belanja kegiatan HUT RI dan Nganjuk	Rp.	1.250.000
	Belanja Modal	Rp.	106.143.500
	Belanja Modal Jaringan	Rp.	101.643.500
1	Kegiatan pembangunan / renovasi irigasi	Rp.	51.643.500
2	Kegiatan pembangunan drainase	Rp.	50.000.000
		Rp.	
	Belanja Modal Peralatan Kantor	Rp.	4.500.000
1	Pengadaan kursi	Rp.	1.500.000
2	Pengadaan sound system	Rp.	3.000.000
B	Belanja Tidak Langsung	Rp.	286.308.000
	Belanja pegawai / penghasilan tetap	Rp.	286.308.000
	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	Rp.	149.500.000
1	Penghasilan tetap kepala desa	Rp.	45.500.000
2	Penghasilan tetap sekdes non pns	Rp.	26.000.000
3	Penghasilan tetap kamituwo 1	Rp.	13.000.000
4	Penghasilan tetap kamituwo 2	Rp.	13.000.000
5	Penghasilan tetap kebayan 1	Rp.	13.000.000
6	Penghasilan tetap kebayan 2	Rp.	13.000.000
7	Penghasilan tetap modin	Rp.	13.000.000

8	Penghasilan tetap jogotirto	Rp.	13.000.000
9	Penghasilan tetap jogoboyo	Rp.	0
10	Tunjangan tambahan penghasilan / kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa	Rp.	122.148.000
11	Tunjangan BPD	Rp.	5.160.000
12	Tambahan tunjangan lainnya BPD	Rp.	1.500.000
13	Tunjangan purna tugas jogoboyo	Rp.	8.000.000
	JUMLAH BELANJA	Rp.	484.355.000
	SURPLUS / DEFISIT	Rp.	5.436.000
	PEMBIAYAAN	Rp.	5.436.000
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
1	Penyertaan Modal Desa	Rp.	5.436.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	(5.436.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0

3. TAHUN 2015

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan :

1.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	31.300.000
2.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	:	Rp.	12.336.000
3.	ADD	:	Rp.	342.997.000
4.	DD	:	Rp.	269.403.000
5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	:	Rp.	20.000.000
	Jumlah Pendapatan	:	Rp.	676.036.000

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Kode Rekening	URAIAN		Jumlah (Rp.)
1	2		3
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	284.298.207
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp.	153.928.000
2.1.1.1	Penghasilan Tetap kades dan perangkat desa	Rp.	120.428.000
2.1.1.2	Tunjangan Kades dan perangkat Desa	Rp.	
2.1.1.2.1	Uang Purna Tugas	Rp.	23.000.000
2.1.1.2.2	Jaminan Kesehatan	Rp.	
2.1.1.2.3	Tunjangan BPD	Rp.	10.500.000
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintahan desa	Rp.	22.193.232
2.1.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	15.594.332
2.1.2.2	Belanja Modal	Rp.	6.598.900
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	Rp.	11.000.635
2.1.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	11.000.635
2.1.3.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.7	Kegiatan Forum Pembina Desa	Rp.	7.350.000
2.1.7.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	7.350.000
2.1.7.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.12	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Rp.	48.434.488
2.1.12.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	17.741.900
2.1.12.2	Belanja Modal	Rp.	30.692.588
2.1.13	Kegiatan Pendataan Desa	Rp.	5.208.952
2.1.13.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	5.208.952
2.1.13.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.15	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Rp.	2.998.800
2.1.15.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.998.800
2.1.15.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.17	Kegiatan Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa	Rp.	6.746.100
2.1.17.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	6.746.100
2.1.17.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.18	Kegiatan Penyelenggaraan system pengelolaan dan Pelaporan keuangan	Rp.	26.438.000

	Desa (SILOKDES)		
2.1.18.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	26.438.000
2.1.18.2	Belanja Modal	Rp.	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	262.320.880
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman (jalan desa)	Rp.	41.318.100
2.2.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	9.595.000
2.2.2.2	Belanja Modal	Rp.	
2.2.3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)	Rp.	176.146.356
2.2.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	43.430.000
2.2.3.2	Belanja Modal	Rp.	132.716.356
2.2.5	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	Rp.	19.556.424
2.2.5.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	8.060.000
2.2.5.2	Belanja Modal	Rp.	11.496.424
2.2.15	Kegiatan pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, polindes ,pos kesehatan desa	Rp.	14.700.000
2.2.15.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	14.700.000
2.2.15.2	Belanja Modal	Rp.	
2.2.21	Kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini	Rp.	4.600.000
2.2.21.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	4.600.000
2.2.21.2	Belanja Modal	Rp.	
2.2.25	Kegiatan pembangunan dan pengembangan BUMDesa	Rp.	6.000.000
2.2.25.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	6.000.000
2.2.25.2	Belanja Modal	Rp.	
2.3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.	103.843.313
2.3.1	Kegiatan pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp.	48.843.713
2.3.1.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	48.843.713
2.3.1.2	Belanja Modal	Rp.	
2.3.2	Kegiatan pembinaan lembaga adat	Rp.	31.478.600
2.3.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	30.941.600
2.3.2.2	Belanja Modal	Rp.	537.000
2.3.10	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional, hari Jadi Daerah	Rp.	23.521.000
2.3.10.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	14.917.000
2.3.10.2	Belanja Modal	Rp.	8.604.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	10.000.000

2.4.3	Kegiatan pemberian santunan social kepada keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rp.	10.000.000
2.4.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	10.000.000
2.4.3.2	Belanja Modal	Rp.	
		Rp.	
	JUMLAH BELANJA	Rp.	660.462.400
		Rp.	
	SURPLUS / DEFISIT	Rp.	13.880.600

3	PEMBIAYAAN		0
3.1	Penerimaan pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		0
	PEMBIAYAAN NETTO		0

4. TAHUN 2016

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan :

1.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	193.300.000
2.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	:	Rp.	14.929.000
3.	ADD	:	Rp.	321.497.970
4.	DD	:	Rp.	602.523.000
5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	:	Rp.	0
	Jumlah Pendapatan	:	Rp.	1.132.249.970



B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Kode Rekening	URAIAN		Jumlah (Rp.)
1	2		3
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	466.338.515
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp.	340.188.945
2.1.1.1	Penghasilan Tetap kades dan perangkat desa	Rp.	131.223.000
2.1.1.2	Tunjangan Kades dan perangkat Desa	Rp.	17.265.945
2.1.1.3	Penerimaan lain yang sah	Rp.	181.200.000
2.1.1.4	Tunjangan BPD	Rp.	10.500.000
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintahan desa	Rp.	58.639.550
2.1.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	24.231.800
2.1.2.2	Belanja Modal	Rp.	34.407.750
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	Rp.	7.511.920
2.1.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	7.511.920
2.1.3.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.7	Kegiatan Forum Pembina Desa	Rp.	4.800.000
2.1.7.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	4.800.000
2.1.7.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.12	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Rp.	15.859.600
2.1.12.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	
2.1.12.2	Belanja Modal	Rp.	15.859.600
2.1.14	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Rp.	1.082.500
2.1.14.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	1.082.500
2.1.14.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.15	Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa	Rp.	2.591.500
2.1.15.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.591.500
2.1.15.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.16	Kegiatan Penyusunan APBDesa,Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa	Rp.	5.364.500
2.1.16.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	5.364.500
2.1.16.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.17	Kegiatan Penyelenggaraan system pengelolaan dan Pelaporan keuangan	Rp.	30.300.000

	Desa (SILOKDES)		
2.1.17.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	25.950.000
2.1.17.2	Belanja Modal	Rp.	4.350.000
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	476.203.214
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman (jalan desa)	Rp.	126.304.100
2.2.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	26.908.200
2.2.2.2	Belanja Modal	Rp.	99.395.900
2.2.3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)	Rp.	246.442.400
2.2.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	70.834.100
2.2.3.2	Belanja Modal	Rp.	175.608.300
2.2.4	Kegiatan Pembangunan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	Rp.	17.295.100
2.2.4.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	5.630.500
2.2.4.2	Belanja Modal	Rp.	11.664.600
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier dan Embung Desa	Rp.	7.561.800
2.2.5.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.751.000
2.2.5.2	Belanja Modal	Rp.	4.810.800
2.2.8	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	Rp.	16.224.364
2.2.8.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	10.736.664
2.2.8.2	Belanja Modal	Rp.	5.487.700
2.2.9	Kegiatan pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, polindes ,pos kesehatan desa	Rp.	16.925.000
2.2.9.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	12.350.000
2.2.9.2	Belanja Modal	Rp.	4.575.000
2.2.12	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga dan Balita (BKB)	Rp.	500.000
2.2.12.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	500.000
2.2.12.2	Belanja Modal	Rp.	
2.2.13	Kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini	Rp.	11.015.450
2.2.13.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	7.365.450
2.2.13.2	Belanja Modal	Rp.	3.650.000
2.2.16	Kegiatan pembangunan dan pengembangan BUMDesa	Rp.	22.750.000
2.2.16.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	22.750.000
2.2.16.2	Belanja Modal	Rp.	

2.2.17	Kegiatan Pembangunan, Peternakan, Perikanan Desa	Rp.	8.000.000
2.2.17.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	8.000.000
2.2.17.2	Belanja Modal	Rp.	
2.2.20	Kegiatan Penyelenggaraan Penghijauan Desa	Rp.	3.685.000
2.2.20.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	3.685.000
2.2.20.2	Belanja Modal	Rp.	
2.3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.	69.918.900
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp.	14.912.500
2.3.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	14.912.500
2.3.2.2	Belanja Modal	Rp.	
2.3.4	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional, hari Jadi Daerah	Rp.	55.006.400
2.3.4.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	53.258.000
2.3.4.2	Belanja Modal	Rp.	1.748.400
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	117.863.036
2.4.1	Kegiatan pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat	Rp.	48.857.536
2.4.1.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	48.857.536
2.4.1.2	Belanja Modal	Rp.	
2.4.2	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	650.000
2.4.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	650.000
2.4.2.2	Belanja Modal	Rp.	
2.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Rp.	41.188.000
2.4.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	38.702.000
2.4.3.2	Belanja Modal	Rp.	2.486.000
2.4.4	Kegiatan pemberian santunan social kepada keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rp.	12.500.000
2.4.4.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	12.500.000
2.4.4.2	Belanja Modal	Rp.	
2.4.3	Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal	Rp.	14.667.500
2.4.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	14.667.500
2.4.3.2	Belanja Modal	Rp.	
	JUMLAH BELANJA	Rp.	1.130.323.665
		Rp.	
	SURPLUS / DEFISIT	Rp.	1.926.305

3	PEMBIAYAAN	Rp.	13.880.600
3.1	Penerimaan pembiayaan	Rp.	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp.	13.880.600
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	13.880.600
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp.	15.806.905

5. TAHUN 2017

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan :

1.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	193.710.903
2.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	:	Rp.	16.735.323
3.	ADD	:	Rp.	394.627.000
4.	DD	:	Rp.	602.523.000
5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	:	Rp.	0
	Jumlah Pendapatan	:	Rp.	1.362.884.226

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Kode Rekening	URAIAN		Jumlah (Rp.)
1	2		3
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	542.529.705
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp.	410.370.252
2.1.1.1	Penghasilan Tetap kades dan perangkat desa	Rp.	214.908.000
2.1.1.2	Tunjangan Kades dan perangkat Desa	Rp.	36.762.252
2.1.1.3	Penerimaan lain yang sah	Rp.	144.000.000
2.1.1.4	Tunjangan BPD	Rp.	14.700.000
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintahan desa	Rp.	39.030.500
2.1.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	28.798.500
2.1.2.2	Belanja Modal	Rp.	10.232.000

2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	Rp.	8.930.500
2.1.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	8.930.500
2.1.3.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.7	Kegiatan Forum Pembina Desa	Rp.	4.800.000
2.1.7.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	4.800.000
2.1.7.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.12	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Rp.	38.736.548
2.1.12.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.518.400
2.1.12.2	Belanja Modal	Rp.	36.218.148
2.1.13	Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	2.485.000
2.1.13.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	
2.1.13.2	Belanja Modal	Rp.	2.485.000
2.1.14	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Rp.	2.405.000
2.1.14.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.405.000
2.1.14.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.15	Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa	Rp.	2.560.000
2.1.15.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.560.000
2.1.15.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.16	Kegiatan Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa	Rp.	3.340.000
2.1.16.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	3.340.000
2.1.16.2	Belanja Modal	Rp.	
2.1.17	Kegiatan Penyelenggaraan system pengelolaan dan Pelaporan keuangan Desa (SILOKDES)	Rp.	29.871.905
2.1.17.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	29.065.000
2.1.17.2	Belanja Modal	Rp.	806.905
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	647.002.357
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman (jalan desa)	Rp.	17.840.800
2.2.2.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.780.000
2.2.2.2	Belanja Modal	Rp.	15.060.800
2.2.3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)	Rp.	169.216.544
2.2.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	63.087.500
2.2.3.2	Belanja Modal	Rp.	106.129.044
2.2.4	Kegiatan Pembangunan dan	Rp.	49.999.100

	Pemeliharaan Sarana Prasarana lingkungan Permukiman Masyarakat		
2.2.4.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	21.971.200
2.2.4.2	Belanja Modal	Rp.	28.027.900
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier dan Embung Desa	Rp.	95.212.000
2.2.5.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	37.380.300
2.2.5.2	Belanja Modal	Rp.	57.831.700
2.2.8	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	Rp.	14.069.250
2.2.8.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	4.963.250
2.2.8.2	Belanja Modal	Rp.	9.106.000
2.2.9	Kegiatan pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, polindes ,pos kesehatan desa	Rp.	23.052.500
2.2.9.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	23.052.500
2.2.9.2	Belanja Modal	Rp.	
2.2.14	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa	Rp.	3.200.000
2.2.14.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	
2.2.14.2	Belanja Modal	Rp.	3.200.000
2.2.15	Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Kesehatan Desa	Rp.	2.900.000
2.2.15.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.900.000
2.2.15.2	Belanja Modal	Rp.	
2.2.16	Kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini	Rp.	19.300.000
2.2.16.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	12.300.000
2.2.16.2	Belanja Modal	Rp.	7.000.000
2.2.17	Kegiatan pengembangan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya dan Perpustakaan Desa	Rp.	247.412.163
2.2.17.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	53.419.500
2.2.17.2	Belanja Modal	Rp.	193.992.663
2.2.19	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Pendidikan Desa	Rp.	4.800.000
2.2.19.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	4.800.000
2.2.19.2	Belanja Modal	Rp.	
2.3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.	73.533.043
2.3.4	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional, hari Jadi Daerah	Rp.	73.533.043
2.3.4.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	72.150.000
2.3.4.2	Belanja Modal	Rp.	1.383.043
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	92.662.500

2.4.1	Kegiatan pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat	Rp.	68.900.000
2.4.1.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	68.900.000
2.4.1.2	Belanja Modal	Rp.	
2.4.10	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Rp.	3.000.000
2.4.10.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	3.000.000
2.4.10.2	Belanja Modal	Rp.	
2.4.12	Kegiatan pemberian santunan social kepada keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rp.	15.000.000
2.4.12.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	15.000.000
2.4.12.2	Belanja Modal	Rp.	
2.4.3	Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal	Rp.	14.667.500
2.4.3.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	14.667.500
2.4.3.2	Belanja Modal	Rp.	
2.5	Bidang Kewengan Berdasarkan Hak Asal Usul	Rp.	6.343.800
2.5.5	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	2.100.000
2.5.5.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.100.000
2.5.5.2	Belanja Modal	Rp.	
2.5.7	Kegiatan Pengelolaan Tanah Bengkok	Rp.	4.243.800
2.5.7.1	Belanja Barang/jasa	Rp.	4.243.800
2.5.7.2	Belanja Modal	Rp.	
	JUMLAH BELANJA	Rp.	1.362.071.405
		Rp.	
	SURPLUS / DEFISIT	Rp.	812.821
3.1	Penerimaan pembiayaan	Rp.	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp.	15.806.905
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	15.806.905
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp.	16.619.726

6. TAHUN 2018

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan :

1.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	201.881.298,60
2.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	:	Rp.	38.385.055
3.	ADD	:	Rp.	350.674.000
4.	DD	:	Rp.	724.433.000
5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	:	Rp.	0
Jumlah Pendapatan			:	Rp. 1.315.373.353

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Kode Rekening	URAIAN		Jumlah (Rp.)
1	2		3
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	546.894.040,58
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp.	408.898.920,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai		408.898.920,00
2.1.1.1.01	Penghasilan Tetap kades dan perangkat desa	Rp.	208.824.000,00
2.1.1.1.02	Tunjangan Kades dan perangkat Desa	Rp.	13.684.920,00
2.1.1.1.03	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	144.000.000,00
2.1.1.1.04	Tunjangan Staf Desa	Rp.	23.490.000,00
2.1.1.1.06	Tunjangan BPD	Rp.	18.900.000,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintahan desa	Rp.	42.218.120,58
2.1.2.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	33.915.839,00
2.1.2.3	Belanja Modal	Rp.	8.302.281,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	Rp.	8.110.000,00
2.1.3.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	8.110.000,00
2.1.3.3	Belanja Modal	Rp.	
2.1.4	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Rp.	
2.1.4.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	
2.1.4.3	Belanja Modal	Rp.	

2.1.6	Kegiatan Pembentukan BPD	Rp.	9.589.500,00
2.1.6.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	9.589.500,00
2.1.6.3	Belanja Modal	Rp.	
2.1.7	Kegiatan Forum Pembina Desa	Rp.	4.800.000,00
2.1.7.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	4.800.000,00
2.1.7.3	Belanja Modal	Rp.	
2.1.12	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Rp.	20.667.500,00
2.1.12.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	20.667.500,00
2.1.12.3	Belanja Modal	Rp.	
2.1.15	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Rp.	2.895.000,00
2.1.15.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.895.000,00
2.1.15.3	Belanja Modal	Rp.	
2.1.16	Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa	Rp.	3.230.000,00
2.1.16.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	3.230.000,00
2.1.16.3	Belanja Modal	Rp.	
2.1.18	Kegiatan Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa	Rp.	3.400.000,00
2.1.18.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	3.400.000,00
2.1.18.3	Belanja Modal	Rp.	
2.1.19	Kegiatan Penyelenggaraan system pengelolaan dan Pelaporan keuangan Desa (SILOKDES)	Rp.	43.075.000,00
2.1.19.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	31.400.000,00
2.1.19.3	Belanja Modal	Rp.	11.675.000,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	505.083.000,00
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman (jalan desa)	Rp.	70.204.100,00
2.2.1.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	
2.2.1.3	Belanja Modal	Rp.	70.204.100,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)	Rp.	50.286.300,00
2.2.2.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	
2.2.2.3	Belanja Modal	Rp.	50.286.300,00
2.2.4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana lingkungan Permukiman Masyarakat	Rp.	206.904.600,00
2.2.4.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	12.810.000,00

2.2.4.3	Belanja Modal	Rp.	194.094.600,00
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier dan Embung Desa	Rp.	40.007.800
2.2.5.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	6.720.000,00
2.2.5.3	Belanja Modal	Rp.	33.287.800,00
2.2.9	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	Rp.	13.800.000,00
2.2.9.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	13.800.000,00
2.2.9.3	Belanja Modal	Rp.	
2.2.10	Kegiatan pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, polindes ,pos kesehatan desa	Rp.	35.474.038,00
2.2.10.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	35.024.038,00
2.2.10.3	Belanja Modal	Rp.	
2.2.12	Kegiatan Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa	Rp.	9.450.000,00
2.2.12.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	9.450.000,00
2.2.12.3	Belanja Modal	Rp.	
2.2.13	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga dan Balita (BKB)	Rp.	400.000,00
2.2.13.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	400.000,00
2.2.13.3	Belanja Modal	Rp.	
2.2.15	Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Kesehatan Desa	Rp.	6.350.000,00
2.2.15.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	6.350.000,00
2.2.15.3	Belanja Modal	Rp.	
2.2.16	Kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini	Rp.	12.600.000,00
2.2.16.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	12.600.000,00
2.2.16.3	Belanja Modal	Rp.	
2.2.17	Kegiatan pengembangan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya dan Perpustakaan Desa	Rp.	30.906.162,00
2.2.17.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	410.000,00
2.2.17.3	Belanja Modal	Rp.	30.496.162,00
2.2.19	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Pendidikan Desa	Rp.	9.700.000,00
2.2.19.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	9.700.000,00
2.2.19.3	Belanja Modal	Rp.	
2.2.22	Kegiatan Pembangunan, Peternakan, Perikanan Desa	Rp.	19.000.000,00
2.2.22.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	19.000.000,00
2.2.22.3	Belanja Modal	Rp.	

2.3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.	79.400.000,00
2.3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		2.500.000,00
2.3.1.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	2.500.000
2.3.1.3	Belanja Modal	Rp.	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	Rp.	3.150.000,00
2.3.2.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	3.150.000,00
2.3.2.3	Belanja Modal	Rp.	
2.3.4	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional, hari Jadi Daerah	Rp.	73.750.000,00
2.3.4.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	73.750.000,00
2.3.4.3	Belanja Modal	Rp.	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	138.385.000
2.4.1	Kegiatan pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat	Rp.	62.450.000,00
2.4.1.1	Belanja Pegawai	Rp.	28.600.000,00
2.4.1.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	33.850.000,00
2.4.1.3	Belanja Modal	Rp.	
2.4.3	Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp.	8.340.000,00
2.4.3.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	8.340.000,00
2.4.3.3	Belanja Modal	Rp.	
2.4.4	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp.	15.895.000,00
2.4.4.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	6.895.000,00
2.4.4.3	Belanja Modal	Rp.	9.000.000,00
2.4.5	Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lolak	Rp.	7.250.000,00
2.4.5.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	7.250.000,00
2.4.5.3	Belanja Modal	Rp.	
2.4.8	Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Olahraga Seni Budaya	Rp.	9.010.000,00
2.4.8.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	9.010.000,00
2.4.8.3	Belanja Modal	Rp.	
2.4.10	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Rp.	11.480.000,00
2.4.10.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	11.480.000,00
2.4.10.3	Belanja Modal	Rp.	
2.4.12	Kegiatan pemberian santunan social kepada keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rp.	20.000.000,00
2.4.12.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	20.000.000,00

2.4.12.3	Belanja Modal	Rp.	
2.4.13	Kegiatan Penyusunan Data dan Sistem Informasi Kemiskinan Secara Partisipatif di Desa	Rp.	3.960.000,00
2.4.13.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	3.960.000,00
2.4.13.3	Belanja Modal	Rp.	
2.5	Bidang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul	Rp.	33.620.000,00
2.5.2	Kegiatan Sistem Organisasi Masyarakat Adat	Rp.	32.000.000,00
2.5.2.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	
2.5.2.3	Belanja Modal	Rp.	32.000.000,00
2.5.5	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	1.620.000,00
2.5.5.2	Belanja Barang/jasa	Rp.	1.620.000,00
2.5.5.3	Belanja Modal	Rp.	
	JUMLAH BELANJA	Rp.	1.303.382.040,58
		Rp.	
	SURPLUS / DEFISIT	Rp.	11.991.313,02
3.1	Penerimaan pembiayaan	Rp.	16.619.726,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp.	16.619.726,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	16.619.726,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp.	28.611.039,02

Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi

17 MAR 2021



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus: Jl. Semokowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5925289, 081216781276 E-mail: info@untag.ac.id



SEMESTER
~~Gasal / Genap~~
 2020, 2021

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa / NBI : (1221700036) Dini Kumiasari / 1221700036

Nama Pembimbing : Prof. Dr. Tri Ratrawati, S.E., M.S., CA., CPA

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan
 Transparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap
 Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Laceret
 Kabupaten Mganjue

Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. Selesai Bimbingan Tanggal

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	15-03-21	Judul	Konkultasi, revisi	[Signature]
2	15-03-21	-	Ace	[Signature]
3	27-03-21	Bab I,	Revisi	[Signature]
4	6-05-21	" I	Ace	[Signature]
5	17-05-21	" II	Konkultasi, Revisi	[Signature]
6	06-05-21	" II	Ace	[Signature]
7	31-05-21	" III	Konkultasi, revisi	[Signature]
8	4-06-21	" IV, V	" "	[Signature]
9	13-06-21	" III	Ace	[Signature]
10	13-06-21	" IV, V	Ace, I dan V Ace	[Signature]
				

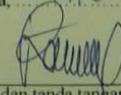
Perpanjangan I : _____

Semester : _____

Th. Ak. : _____

Paraf Kajar : _____

Surabaya, 14/6-2021



(Nama dan tanda tangap Pembimbing)

Lampiran 9. Hasil Turnitin

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	loceret.nganjukkab.go.id Internet Source	4%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
3	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	3%
4	e-journal.unizar.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.umj.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
7	journal.ummat.ac.id Internet Source	2%
8	jurnal.stiatabalong.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 52 words